

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Realisasi PAD Kurang Rp 12,9 T

## Gambir, Warta Kota

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 masih kurang sekitar Rp 12,9 triliun.

Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, perolehan PAD DKI sampai 17 Oktober 2019 mencapai 70,86 persen atau setara Rp 31,5 triliun dari target.

Angka ini lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah daerah sebesar Rp 44,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019.

Gubernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan, mengatakan, Selasa (22/10) di-update (perbarui) kembali. "Karena setiap Selasa ada perbaruan soal pendapatan," ungkap Anies saat menanggapi realisasi PAD yang belum menembus target pemerintah.

Padahal sejak Agustus 2019, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai gebrakan salah satunya adalah Program Keringanan Pajak Daerah. Program ini menghapus sanksi denda bagi wajib pajak yang telat menunaikan kewajibannya kepada pemerintah.

Bahkan DKI memberikan diskon sebesar 25 sampai 50 persen pokok pajak bagi ma-

syarakat yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Selasa (22/10) mudah-mudahan sudah beres. Karna memang segitu, tergantung kondisi ekonomi," ujarnya. "Bukan hanya usaha saja, tapi juga kalau transaksinya *nggak* ada, apa yang mau *dipajakin*? Kan masalahnya bukan pajaknya, tapi transaksinya."

## Pemangkasan

Sekretaris Daerah DKI Ja-

karta, Saefulloh, mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pemangkasan anggaran yang bukan menjadi prioritas. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan pemerintah bisa diefisiensi semaksimal mungkin.

Efisiensi anggaran bisa dilakukan pada pengurangan jumlah peserta perjalanan dinas termasuk penghematan penggunaan telepon, air, listrik dan internet. "Tentu kami harap hingga akhir tahun ini PAD sudah bisa dikejar oleh BPRD DKI," ujar Saefulloh. (faf)